

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DPPK KEPUASAN MASYRAKAT KELURAHAN TOGOLOBE KECAMATAN PULAU HIRI KOTA TERNATE

Risna Nurdin
Narilah A Tuara
Program Studi Pendidikan Ekonomi
STKIP Kie Raha Ternate
tuaranarilah@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan dana DPPK Kepuasan Masyarakat kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate. Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi kebijakan dana DPPK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Togolobe dan Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana DPPK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Togolobe. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan untuk mendiskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dengan menggunakan metode ini, penulis diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai implementasi kebijakan dana DPPK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Togolobe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Alokasi Dana pembangunan prespektif Kelurahan di Kelurahan togolobe dapat dikategorikan baik. Hal ini dinilai dari pelaksanaan tiap tahapan implementasi yang sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang terkait yakni Peraturan tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi DPPK. ada beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya, Faktor Komunikasi , Faktor Sumberdaya, Faktor Sikap, Faktor Struktur Birokrasi, Faktor Lingkungan serta Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Siti Aida Faradisha (2015 :1)

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.

Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai anggaran keuangan kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing – masing dari

kelurahan ini diberi wewenang mengelola anggaran sendiri. Ini merupakan implementasi dari konsep Otonomi Daerah.

Dana kelurahan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pemanfaatan dana untuk pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta stimulasi perekonomian masyarakat. Dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 43 tahun 2017 diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana dan Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun 2018, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat yang ada di kelurahan, maka perlu ditunjang dengan dana yang memadai, sehingga proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Dalam peraturan Walikota tersebut dapat diketahui bahwa harapannya dari pengelolaan dana agar dapat terlaksananya ekonomi kelurahan yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong, sehingga proses pemberdayaan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Namun yang terjadi di Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri menjadi persoalan dalam pengambilan Kebijakan Dana DPPK yaitu adanya ketidak terbukaan dari Lurah dan tidak membantu masyarakat dalam memanfaatkan dana DPPK. Maka perlu adanya Implementasi Kebijakan Dana DPPK oleh Lurah dalam melayani masyarakatnya dengan baik.

Pencairan dan Penyaluran Dana Kelurahan Togolobe

Pencairan dana Alokasi Dana Kelurahan menggunakan sistem Dua Semester. Pada tiap semester Kelurahan menerima dana sebesar 50% dengan ketentuan semua persyaratan administrasi terpenuhi untuk Semester pertama. Kemudian pada Semester berikutnya dana dicairkan dengan syarat semua kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Semester Pertama telah dikerjakan dan diselesaikan. Adapun pencairan dana Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Togolobe dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Tahap Penyaluran Dana Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate Tahun 2019

No	Kegiatan	Penyaluran		Jumlah (Rupiah)
		Semester I	Semester I	
1	Kegiatan pemerintahan kelurahan	18.000.000	12.000.000	30.000.000
2	Pemberdayaan masyarakat	32.000.000	38.000.000	70.000.000
Jumlah		50.000.000	50.000.000	100.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Alokasi Dana Tahun 2019

Penyaluran dana dari pihak Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate dilakukan melalui system pencairan dana di Bank BRI Kota Ternate dan diterima langsung kepada Kepala Kelurahan sebagai Penanggung Jawab Pelaksana. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan dan Bendahara untuk diadministrasikan dan segera dilaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).

KAJIAN TEORI Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ ...*a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* “ (...serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usul kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policymaking process*, yang pertama merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Menurut Santoso(2012) bahwa implementasi kebijakan adalah “*is the stage of policymaking between the establishment of a policy*”. Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan ditegaskan oleh Udoji mengutip sebagai “*the execution of policies is important if not more important than policy making*”. Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar kebijakan. Persoalan lain pada implementasi kebijakan adalah apa yang dikatakan oleh Santoso (2012) disebut sebagai “kompleksitas tindakan bersama”.

Syukami(2000) mengatakan implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas terlihat bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses di mana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan data yang terkumpul

secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, penulis diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai implementasi kebijakan dana DPK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Togolobe.

Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri, Pemerintah Kelurahan Togolobe, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dana DPK serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan dana DPK di Kelurahan Togolobe.
2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang pelayanan publik pemerintah di Kelurahan Togolobe.
3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Analisis data

Penelitian memiliki tujuan pokok untuk memperoleh jawaban atas masalah atau fokus yang akan diteliti. Dalam hal ini, masalah yang ingin diteliti terkait dengan fenomena yang ada dalam implementasi kebijakan dana DPPK di Kelurahan Togolobe. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pokok itu adalah dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Sesuai dengan metode penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Demografi

Penduduk di kelurahan togolobe berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk pada tahun 2014 tercatat 3,335 jiwa, tahun 2013 sebanyak 2.975 jiwa, tahun 2011 sebanyak 2.850

jiwa, mengalami kenaikan setiap tahun rata-rata sebesar 0,05%. Kondisi sosisl kelurahan togolobe terdiri dari masyarakat yang hitrogen dan ditambah penduduk pendatang . dan untuk lebih jelasnya lagi lihat pada table berikut.

Table 4.4. jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki- laki	1712	51%
2	Prempuan	1623	23%
Jumlah	Jumlah	3335	100%

Sumber:Data Kelurahan Togolobe

Tabel Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Kelompok usia	Jumlah	Persentase(%)
1	0-2 tahun	342	10,2%
2	3-4 tahun	453	49%
3	4-6 tahun	277	100%
4	7-12 tahun	167	5%
5	13-15 tahun	298	8,9%
6	16-19 tahun	214	6,4%
7	20- 30 tahun	488	14,5%
8	31-45 tahun	293	8,7%
9	46-60 tahun	372	11,1%
10	60-70 tahun	155	4,6%
11	71>	276	8,8%
	Jumlah	3335	100%

Sumber:Data Kelurahan Togolobe

Implementasi Kebijakan Dana DPK Di Kelurahan Togolobe

Dengan menggunakan teknik survey,penelitian ini berupaya mengetahui secara empiris sejauh mana implementasi kebijakan dana DPPK di kelurahan togolobe dan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya, Faktor Komunikasi , Faktor Sumberdaya, Faktor Sikap, Faktor Struktur Birokrasi, Faktor Lingkunganserta Faktor Ukuran dan TujuanKebijakan.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi/informasi bersumber dari para informan yang ternyata mempunyai tanggapan yang cukup beragam. Namun pada hakekatnya mereka sependapat tentang perlunya peningkatan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam.

b. Kemampuan Sumber Daya

Kemampuan Sumberdaya Manusia. Secara umum kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dana pembangunan partisipatif masyarakat masih terbatas sehingga mempengaruhi kualitas implementasi DPPK untuk mencapai standar tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi. Atau dengan kata lain para pelaksana DPPK belum sesuai dengan standar kompetensi meskipun mereka mempunyai cukup pengalaman. Selain faktor sumberdaya manusia ada juga faktor komunikasi yang masih terbatas mengakibatkan pembangunan baik pembangunan non fisik maupun pembangunan fisik yang masih belum merata sehingga butuh kebijakan pemerintah kelurahan Togolobe lebih bekerja keras demi tersalurnya pembangunan yang merata melalui dana pembangunan partisipatif kelurahan.

c. Faktor Sikap

Secara umum sikap masyarakat kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate mengarah pada dukungan kebijakan yang dilakukan Lurah tentang Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPPK). Menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan Togolobe masih memiliki sifat ambigu terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Togolobe.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan upaya pemerintah kelurahan Togolobe untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi Publik tunduk pada para pejabat. Masyarakat secara umum kelurahan Togolobe belum merasa puas sehingga menimbulkan kritikan dari masyarakat terhadap kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Togolobe.

e. Faktor Lingkungan

Lembaga masyarakat Kelurahan Togolobe mempunyai peran yang cukup besar guna menyalurkan aspirasi dalam implementasi alokasi dana Pembangunan Kelurahan (DPPK) Kecamatan Pulau Hiri. Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

f. Ukuran dan tujuan Kebijakan

Ukuran kegiatan berdasarkan pada dana yang diberikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Kelurahan. Adapun sasaran atau tujuan dari kebijakan dana Pembangunan Kelurahan (DPPK) diberikan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan, karena dana yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan terbatas, maka sebelum melaksanakan suatu kerja atau kegiatan, pemerintah kelurahan melibatkan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) serta tokoh masyarakat tentang perencanaan kerja yang akan dilaksanakan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Alokasi Dana pembangunan prospektif Kelurahan di Kelurahan togolobe dapat dikategorikan baik. Hal ini dinilai dari pelaksanaan tiap tahapan implementasi yang

sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang terkait yakni Peraturan tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi DPPK.

2. Dalam implementasi Alokasi DPPK di Kelurahan togolobe ditemukan beberapa hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal, yaitu hambatan yang berasal dari pihak Pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan sedangkan hambatan eksternal, yaitu hambatan yang berhubungan dengan masyarakat serta terkait dengan koordinasi dengan Tim Pengendali di tingkat Distrik dan Tim Pembina di tingkat kabupaten/Kota.

3. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan diberikan beberapa saran, yaitu sebagaiberikut:

1. Harus ada sosialisasi secara terbuka dilakukan oleh pihak kelurahan togolobe agar masyarakat mengetahui alokasi dana pembangunan partisipatif kelurahan yang akan dikelola untuk pembangunan kelurahan.
2. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah kelurahan harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat di kelurahan togolobe.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Nurul Aida dan Ervita Luluk Zahara. 2015. Dana Kelurahan dan Tantangannya. Buletin APBN Vol. III, Edisi 21, November 2018.
- Islamy, M. Irfan, DR,MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- Nugroho. 2014. *Public Policy Dalam teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, Zahnudin Nurhidayatullah Dwi., Dg. Pabalik, Wisang Candra Bintari. 2017. Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong. Universitas Muihammadiyah Sorong.
- Santoso, Pandji. 2012. *Administrasi Publik dalam Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Syukami, H.R, dan Rasyid. 2000. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Cleaves (dalam Wahab 2008 : 187) *Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”*